



PENILAIAN KETANGGUHAN KAPASITAS ANGGARAN DAERAH DI MASA PANDEMI COVID 19

Ika Kurnia Indriani ^{1)*}, Agus Widodo ²⁾, V. Ananta Wikrama Tungga Dewi ³⁾

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78124, Indonesia

E-mail: ¹ikakurniaindriani@gmail.com, ²widodoagus86@gmail.com,

³vanantawikrama@polnep.ac.id

Abstrak

Ketangguhan kapasitas anggaran daerah menjadi faktor penting didalam penanggulangan pandemi covid 19 di Indonesia. Anggaran menjadi kunci pertumbuhan ekonomi dan pemulihan kondisi pasca pandemi covid 19. Indeks kapasitas anggaran menunjukkan kemampuan daerah didalam mengelola keuangan dimasa pandemi covid 19. Indeks kapasitas anggaran bertujuan untuk menilai ketahanan kapasitas anggaran jika dihadapkan dengan kondisi tidak terduga. Tiga indikator utama penilaian yaitu solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik perhitungan aritmatika dan geometri untuk menentukan indeks ketahanan kapasitas anggaran daerah. Hasil penilaian indeks kapasitas anggaran menunjukkan provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Papua Barat sebagai daerah dengan indeks tertinggi di Indonesia. Pemerintah provinsi tersebut memiliki ketahanan kapasitas anggaran terbaik dimasa pandemi covid 19.

Kata kunci: Kapasitas Anggaran, Solvabilitas Anggaran, Kemandirian Keuangan, Solvabilitas Layanan, Covid 19.

ASSESSING LOCAL BUDGET CAPACITY RESILIENCE IN TIMES COVID 19 PANDEMIC

Abstract

The local budget capacity resilience is an important factor in overcoming the covid 19 pandemic in Indonesia. It is a crucial factor in increasing economic growth and recovery conditions after the covid-19 pandemic. The budget capacity index shows the local government's ability to manage financial conditions during the covid 19 pandemic. The budget capacity index aims to assess local budget resilience to handle the unconditional situation. There are three indicators for assessing budget capacity resilience: budget solvency, financial independence, and service level solvency. This study uses a descriptive quantitative approach with arithmetic and geometric calculation techniques to determine the resilience index of local budget capacity. The results of the budget capacity index assessment show the provinces of DKI Jakarta, Banten, and West Papua as the regions with the highest index in Indonesia. The provincial government has the best budget resilience during the covid 19 pandemic.

Keywords: *Budget Capacity, Budget Solvency, Financial Independent, Service Level Solvency, Covid 19.*

Article History: Received: 23 Oct 2022 Revised: 20 Oct 2022 Accepted: 6 Nov 2022

PENDAHULUAN

Pandemi covid 19 secara nasional membawa dampak yang signifikan kepada ekonomi, kesehatan masyarakat, dan merubah cara hidup masyarakat (Susantono et al., 2020). Dampak pandemi terhadap ekonomi nasional adalah penurunan pertumbuhan sebesar minus 2,1 persen (BPS RI, 2022) Penurunan tersebut merupakan persentase terendah sejak krisis ekonomi asia 1997-1998 (Muhyiddin & Nugroho, 2021). Pengaruh pandemi terhadap kegiatan ekonomi nasional membawa dampak kepada seluruh sektor bisnis. Hal ini ditandai dengan penurunan produksi, penjualan, hingga pemutusan kerja (Cho & Kurpierz, 2020). Menghadapi kondisi ini pemerintah memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional ditengah proses penanggulangan kasus covid 19.

Kasus covid 19 pertama di Indonesia terjadi pada Maret tahun 2020. Akibat kondisi ini seluruh sektor industri, manufaktur, jasa dan produksi Indonesia mengalami penurunan produksi, penjualan, hingga berakibat pada pemutusan tenaga kerja. Pada 31 Desember 2021 jumlah kasus covid 19 mencapai 4.487.905 (Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021).

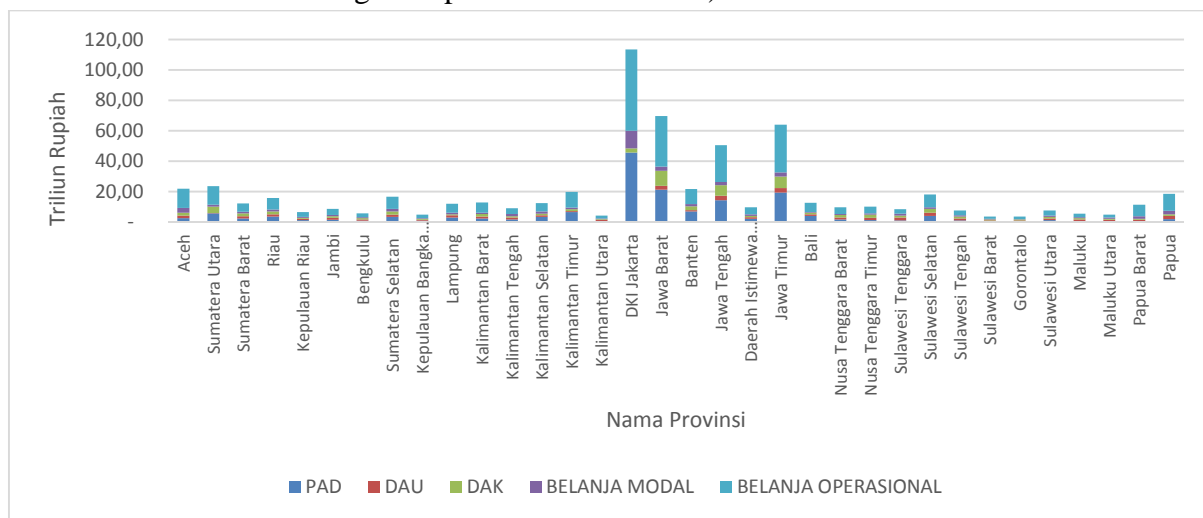
Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk menekan jumlah penyebaran covid 19 dan berupaya mengembalikan kondisi ekonomi. Anggaran pendapatan dan belanja menjadi stimulus fiskal yang digunakan untuk menggerakkan ekonomi. Ada dua instrumen fiskal yang menopang ekonomi Indonesia selama pandemi covid 19 yaitu APBN dan APBD. Anggaran pemerintah menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi negara (Hasibuan et al., 2020). Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana penggulungan covid

19 sebesar 1.035 triliun rupiah (Muhyiddin & Nugroho, 2021). Alokasi anggaran penanggulangan pandemi dilakukan melalui APBN 937,45 triliun rupiah dan APBD sebesar 86,36 triliun rupiah (Hasibuan et al., 2020). Pandemi covid 19 mengharuskan pemerintah untuk menyeimbangkan anggaran untuk bidang kesehatan dan ekonomi. Realisasi APBN dan APBD menjadi penggerak ekonomi nasional dimasa pandemi (Hasibuan et al., 2020). Keberhasilan penanggulangan pandemi sangat dipengaruhi oleh kapasitas anggaran pemerintah (Susantono et al., 2020). Ketepatan realisasi anggaran menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah dimasa pandemi covid 19 (Subekan & Iskandar, 2020). Grafik 1 akan menggambarkan proporsi realisasi pendapatan dan belanja pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2019.

Proporsi realisasi pendapatan pemerintah provinsi di Indonesia terletak pada realisasi DAU dan DAK. Sedangkan, belanja daerah didominasi oleh realisasi belanja operasional. Pada tahun 2019 pemerintah Provinsi DKI menjadi provinsi dengan proporsi APBD tertinggi di Indonesia dengan realisasi pendapatan dan belanja mencapai 110 Triliun Rupiah. Kondisi kapasitas anggaran tahun 2019 menjadi acuan dalam penilaian kapasitas anggaran dimasa pandemi covid 19. Pandemi covid 19 akan menurunkan kapasitas anggaran pemerintah akan mengalami penurunan (Suyitno, 2020). Tekanan yang besar terhadap kapasitas anggaran disebabkan oleh peningkatan jumlah belanja, namun diwaktu yang bersamaan terjadi penurunan pendapatan (OECD, 2020a). Kondisi ini berpotensi meningkatkan kemungkinan krisis keuangan di masa pandemi (de Jong & Ho, 2021).

Kapasitas anggaran pemerintah daerah akan meningkat jika terjadi peningkatan pembiayaan daerah (Payne et al., 2021). Akibat meningkatnya pengeluaran di masa pandemi pemerintah harus meningkatkan pembiayaan untuk mengurangi tekanan fiskal. Hal ini terbukti dengan implementasi

program kerja jangka pendek didalam penanganan pandemi covid 19 (OECD, 2020b). Prioritas realisasi anggaran dimasa pandemi untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan menjaga pertumbuhan ekonomi (Sandjaja et al., 2020).



Sumber: Data Olahan (Direktorat Jendral Perbendaharaan Keuangan, 2022)

Grafik 1. Grafik Realisasi Belanja Modal dan Belanja Operasional Tahun 2019

Proporsi realisasi pendapatan pemerintah provinsi di Indonesia terletak pada realisasi DAU dan DAK. Sedangkan, belanja daerah didominasi oleh realisasi belanja operasional. Pada tahun 2019 pemerintah Provinsi DKI menjadi provinsi dengan proporsi APBD tertinggi di Indonesia dengan realisasi pendapatan dan belanja mencapai 110 Triliun Rupiah. Kondisi kapasitas anggaran tahun 2019 menjadi acuan dalam penilaian kapasitas anggaran dimasa pandemi covid 19. Pandemi covid 19 akan menurunkan kapasitas anggaran pemerintah akan mengalami penurunan (Suyitno, 2020). Tekanan yang besar terhadap kapasitas anggaran disebabkan oleh peningkatan jumlah belanja, namun diwaktu yang bersamaan terjadi penurunan pendapatan (OECD, 2020a). Kondisi ini berpotensi

meningkatkan kemungkinan krisis keuangan di masa pandemi (de Jong & Ho, 2021). Kapasitas anggaran pemerintah daerah akan meningkat jika terjadi peningkatan pembiayaan daerah (Payne et al., 2021). Akibat meningkatnya pengeluaran di masa pandemi pemerintah harus meningkatkan pembiayaan untuk mengurangi tekanan fiskal. Hal ini terbukti dengan implementasi program kerja jangka pendek didalam penanganan pandemi covid 19 (OECD, 2020b). Prioritas realisasi anggaran dimasa pandemi untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan menjaga pertumbuhan ekonomi (Sandjaja et al., 2020).

Realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah sangat berpengaruh terhadap kapasitas anggaran daerah. Realisasi pendapatan daerah mengalami

penurunan tajam akibat pandemi. Namun, disisi lain realisasi pengeluaran daerah semakin besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis komprehensif terhadap kapasitas anggaran daerah selama menghadapi pandemi covid 19. Penilaian kapasitas anggaran pemerintah daerah sebagai tahapan analisis ketahanan kapasitas APBD dalam menghadapi kejadian tidak terduga. Selain itu, dengan dilakukannya penilaian kapasitas anggaran akan menjadi tahapan penting dalam proses pengelolaan anggaran daerah yang lebih maksimal pasca pandemi covid 19. APBD merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan negara yaitu sejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan publik dengan optimal (Ritonga, 2015). Oleh karena itu, pada penelitian ini akan berfokus menilai keadaan kapasitas anggaran pemerintah daerah di Indonesia dari indikator solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan. Penilaian indeks kapasitas anggaran pemerintah daerah di Indonesia akan memperoleh peringkat realisasi APBD terbaik dan terendah selama masa pandemi covid 19. Peringkat ini akan menunjukkan ketangguhan anggaran daerah dimasa terjadinya kejadian tidak terduga.

Pandemi covid 19 menyerap anggaran yang cukup besar untuk penaggulangannya (Clouston et al., 2021). Realisasi APBD diprioritaskan untuk menyediakan fasilitas kesehatan, guna menanggulangi covid 19 (Susantono et al., 2020). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas pengelolaan anggaran pemerintah daerah di Indonesia yang telah dilaksanakan, guna menunjukkan kemampuan APBD Indonesia dalam tingkat keberhasilan daerah menghadapi pandemi covid 19. Selain itu, menjadi *early warning*

systems bagi pengelolaan keuangan setelah pandemi, agar terhindar dari krisis keuangan di masa depan.

LANDASAN TEORI

Kapasitas Anggaran Daerah

Penilaian kapasitas anggaran daerah adalah analisis terhadap kemampuan anggaran dalam memenuhi kewajiban keuangan dan kemampuan untuk terus memberikan layanan kepada publik (Ritonga, 2015). Kapasitas anggaran dinilai dari aliran sumber daya dan ketersediaan sumber daya yang informasinya diperoleh dari laporan keuangan. Laporan keuangan yang memberikan informasi kapasitas anggaran adalah realisasi anggaran. Realisasi anggaran menggambarkan kapasitas fiskal dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Penilaian kapasitas anggaran akan dinilai berdasarkan tiga indikator utama yaitu solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan dengan teknik indeks. Ketiga indikator ini akan merepresentasikan ketahanan kapasitas anggaran daerah dalam memenuhi kewajiban operasional, menyelenggarakan pelayanan publik, mengantisipasi kejadian tidak terduga, dan mengeksekusi hak keuangan secara efisien dan efektif (Ritonga, 2015).

Indeks Solvabilitas Anggaran

Indeks solvabilitas anggaran akan menggambarkan kapasitas anggaran daerah untuk menilai keseimbangan antara realisasi pendapatan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran (Ritonga, 2014). Solvabilitas anggaran menekankan penilaian kapasitas anggaran kepada pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan belanja daerah. DAK, DAU, belanja pegawai, belanja modal, dan

belanja operasional. merupakan kegiatan utama dalam pelaksanaan APBD (Ritonga, 2014).

Indeks Kemandirian Keuangan

Indeks kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan kapasitas anggaran daerah untuk tidak rentan terhadap sumber pendanaan diluar kendali baik nasional maupun internasional (Ritonga, 2014). Kemandirian keuangan akan menekankan kapasitas anggaran daerah pada pendapatan asli daerah (PAD), DAU, dan DAK, total pendapatan, dan total belanja. Kemandirian keuangan akan menghasilkan informasi tentang kekuatan APBD dalam melaksanakan segala program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Indeks Solvabilitas Layanan

Indeks solvabilitas layanan menggambarkan kapasitas anggaran pemerintah daerah untuk menyediakan dan melaksanakan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat (Ritonga, 2014). Penilaian indeks solvabilitas layanan akan membandingkan jumlah penduduk dengan pendapatan dan pengeluaran daerah. Realisasi pendapatan dan belanja merupakan representasi kinerja pemerintah dalam mewujudkan program kerja selama satu periode anggaran (Ritonga, 2014). Solvabilitas layanan akan menekankan penilaian terhadap total belanja, belanja modal, belanja operasional, total pendapatan, DAU, dan DAK terhadap total penduduk.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penilaian kapasitas anggaran menggunakan teknik

aritmatika dan geometri sebagai cara utama menghasilkan nilai indeks. Oleh karena itu, pendekatan kuantitatif sangat sesuai diimplementasikan dalam penelitian ini. Penilaian indeks kapasitas anggaran akan menggunakan data sekunder, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2020 dan 2021. Data diperoleh dari website resmi Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jumlah sample dalam penelitian ini sebanyak 34 pemerintah provinsi. Metode perhitungan indeks kapasitas anggaran menggunakan indeks indikator dan indeks dimensi. Indeks kapasitas anggaran akan menggunakan tiga indikator yaitu solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan. Hasil perhitungan indeks akan menghasilkan bobot dan peringkat atas kapasitas anggaran pemerintah daerah. Indeks kapasitas anggaran daerah akan merepresentasikan ketangguhan kapasitas anggaran selama masa pandemi covid 19.

Penilaian ketangguhan kapasitas anggaran dilakukan dengan dua teknik yaitu indeks indikator dan indeks dimensi. Indeks ini dinilai berdasarkan tiga jenis penilaian yaitu solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan. Indeks indikator dan dimensi merupakan teknik perhitungan dengan rata-rata aritmatika dan geometri untuk menghasilkan nilai maksimum (1) dan minimum (0). Perhitungan indeks dimensi menurut Ritonga (2014) dengan formula sebagai berikut.

$$\text{Indeks Indikator} = \frac{(\text{nilai aktual} - \text{nilai minimum})}{(\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum})}$$

$$\text{Indeks Dimensi} = (I_{\text{indikator-1}} + I_{\text{indikator-1}} + I_{\text{indikator-1}} + \dots + I_{\text{indikator-1}})$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks Kapasitas Anggaran Daerah

Penilaian indeks kapasitas anggaran pemerintah provinsi di Indonesia pada masa pandemi covid 19 menghasilkan nilai indeks tertinggi dan terendah. Pemerintah provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Papua Barat daerah dengan indeks tertinggi secara nasional. Sedangkan, pemerintah provinsi Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Papua Barat sebagai pemerintah dengan indeks terendah tingkat nasional. Penilaian indeks kapasitas anggaran dilakukan dengan tiga indikator utama yaitu solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan. Secara keseluruhan nilai indeks kapasitas anggaran pemerintah provinsi di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2021. Namun, nilai indeks menurun dengan rentangan yang relatif kecil dibandingkan tahun 2020. Indeks kapasitas anggaran akan menunjukkan ketangguhan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Solvabilitas Anggaran

Indeks solvabilitas anggaran dengan nilai tertinggi diperoleh pemerintah provinsi DKI Jakarta selama masa pandemi covid 19. Pada tahun 2020 dan 2021 nilai solvabilitas anggaran DKI Jakarta berada pada 0,73 dan 0,71 (tabel 1). Sedangkan, Sulawesi Utara memperoleh nilai terendah yaitu 0,06 dan 0,03 (tabel 1). Indeks solvabilitas anggaran mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja operasional dan belanja modal. Berdasarkan proporsi realisasi anggaran tahun 2021. Pemerintah provinsi akan memprioritaskan anggaran belanja untuk membiayai program penanggulangan pandemi covid 19. Program kerja prioritas yang harus direalisasikan adalah penyediaan fasilitas kesehatan, pembelian vaksin covid 19, dan bantuan

sosial bagi masyarakat. Hal ini dilaksanakan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2020.

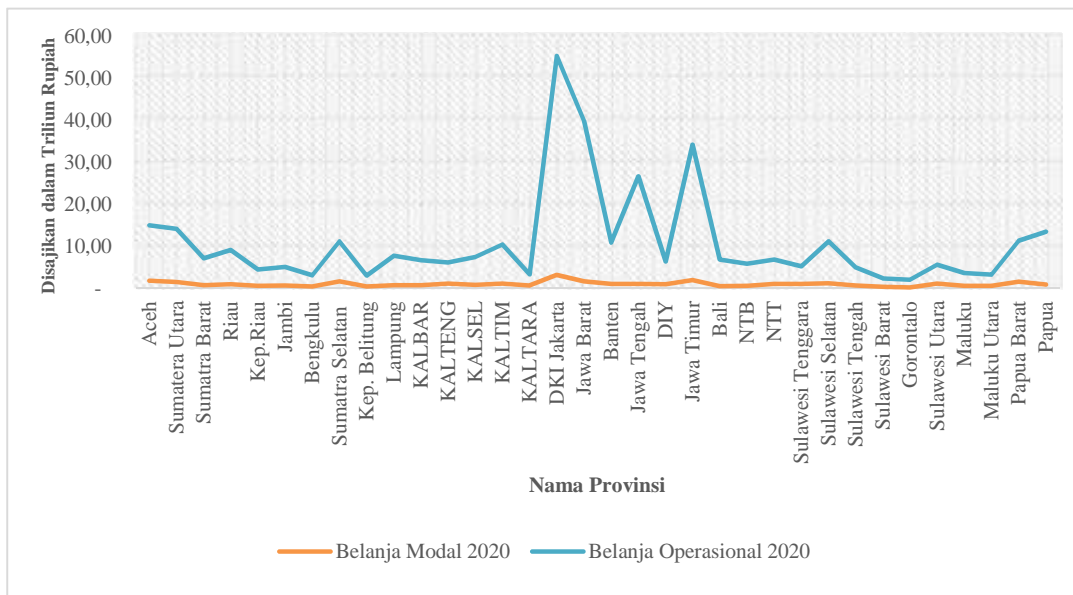
Proporsi anggaran belanja pemerintah daerah yang dialokasikan untuk penanggulangan pandemi mencapai 10 persen dari total anggaran belanja daerah. Proporsi terbesar realisasi belanja pemerintah provinsi tahun anggaran 2020 dan 2021 dialokasikan kepada belanja operasional (gambar 2). Realisasi belanja operasional tertinggi pada tahun 2020 terjadi pada provinsi DKI Jakarta sebesar 52 Triliun Rupiah, Jawa Barat 38 Triliun Rupiah, dan Jawa Timur 32 Triliun Rupiah (gambar 1). Sedangkan, belanja modal tahun 2020 tertinggi direalisasikan oleh DKI Jakarta sebesar 3 Triliun Rupiah, Jawa Timur 1,9 Triliun Rupiah, dan Aceh 1,7 Triliun Rupiah (gambar 1).

Pada tahun 2021 realisasi belanja modal dan belanja operasional mengalami penurunan. Hal ini mempengaruhi nilai indeks kapasitas anggaran yang menurun dibandingkan tahun 2020. Pemerintah provinsi melakukan efisiensi anggaran dan mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan pandemi covid 19. Pada tahun 2021 tingkat penyebaran virus covid 19 semakin tinggi.

Pemerintah melaksanakan kebijakan PPKM level 1 hampir diseluruh wilayah di Indonesia. Kondisi ini berdampak kepada penurunan aktivitas ekonomi yang menyebabkan penurunan penerimaan daerah. Namun, pemerintah provinsi harus melaksanakan program penanggulangan pandemi dan pelaksanaan vaksinasi covid 19 secara massal kepada seluruh masyarakat. Realisasi belanja operasional tertinggi pada tahun 2021 terjadi pada provinsi DKI Jakarta sebesar 54 Triliun Rupiah, Jawa Barat 40 Triliun Rupiah, dan

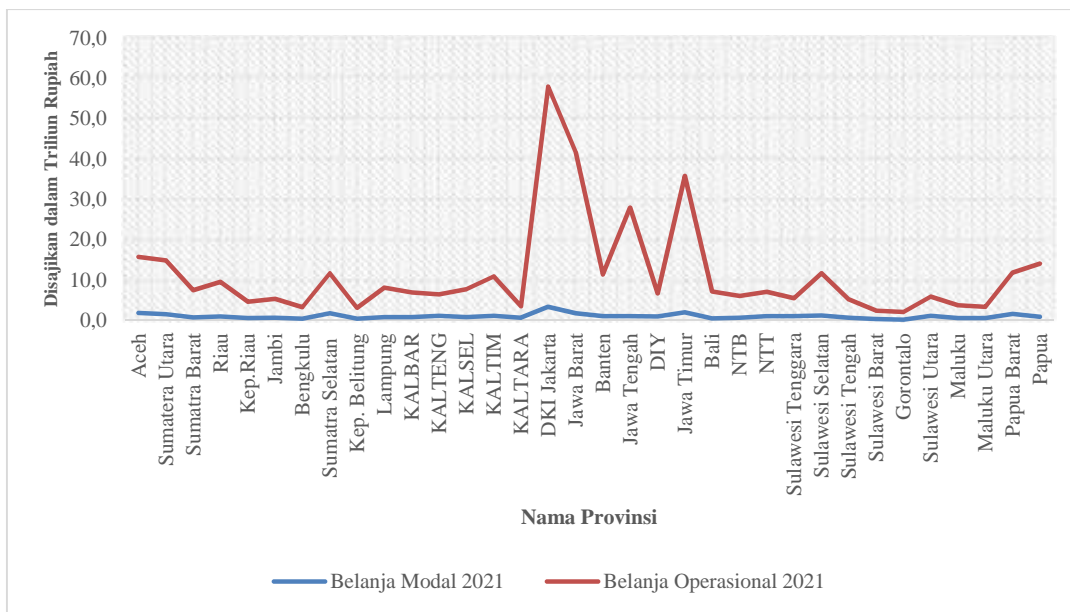
Jawa Timur 33 Triliun Rupiah (gambar 2). Sedangkan, belanja modal tahun 2020 tertinggi direalisasikan oleh DKI Jakarta

sebesar 3 Triliun Rupiah, Jawa Timur 1,9 Triliun Rupiah, dan Aceh 1,8 Triliun Rupiah (gambar 2).



Sumber: Data Olahan (Direktorat Jendral Perbendaharaan Keuangan, 2022)

Gambar 1. Grafik Realisasi Belanja Modal dan Belanja Operasional Tahun 2020



Sumber: Data Olahan (Direktorat Jendral Perbendaharaan Keuangan, 2022)

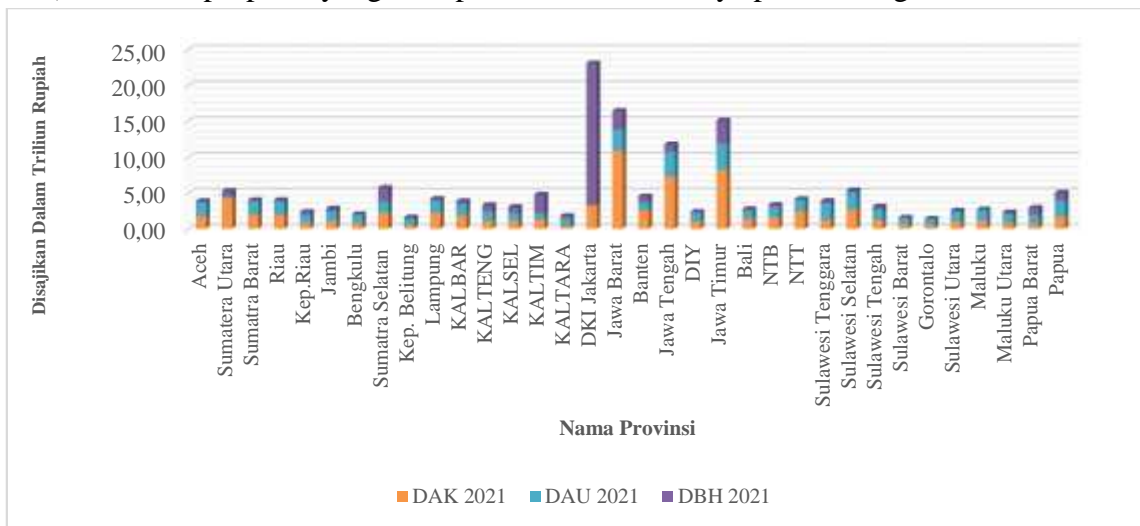
Gambar 2. Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Operasional Tahun 2021

Pandemi covid 19 tidak banyak mempengaruhi solvabilitas anggaran pemerintah provinsi di Indonesia. Hal ini

terlihat dari penurunan nilai indeks yang tidak signifikan. Hal sebaliknya terjadi kepada jumlah realisasi belanja modal dan

operasional yang meningkat khususnya pada pemerintah provinsi di pulau Jawa dan Sumatera. Pendapatan dana alokasi khusus (DAK) memiliki proporsi yang cukup besar

kepada kapasitas fiskal daerah. Penanggulangan pandemi covid 19 membutuhkan anggaran yang cukup besar khususnya pada bidang kesehatan.



Sumber: Data Olahan (Direktorat Jendral Perbendaharaan Keuangan, 2022)

Gambar 3. Proporsi Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat DAK, DAU, dan DBH Tahun 2021

Solvabilitas anggaran pemerintah provinsi sangat dipengaruhi oleh realisasi dana transfer pemerintah pusat. Selama tahun 2021 pendapatan transfer tertinggi yaitu DKI Jakarta mencapai 23 Triliun Rupiah dengan proporsi DAK 3 Triliun Rupiah dan DBH 24 Triliun Rupiah (gambar 3). Sedangkan, pemerintah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur memiliki realisasi DAK, DAU, dan DBH tertinggi (gambar 3). Pemerintah provinsi di pulau Jawa masih mendominasi jumlah realisasi dana transfer tertinggi di Indonesia. Pemerintah daerah diluar pulau Jawa memiliki proporsi pendapatan transfer yang relatif kecil. Pendapatan DAK, DAU, dan DBH memiliki kontribusi yang besar kepada penanggulangan pandemi covid 19. Pendapatan tranfer dialokasikan kepada belanja bidang kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam

Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang memprioritaskan alokasi anggaran dapa bidang kesehatan.

Kemandirian Keuangan

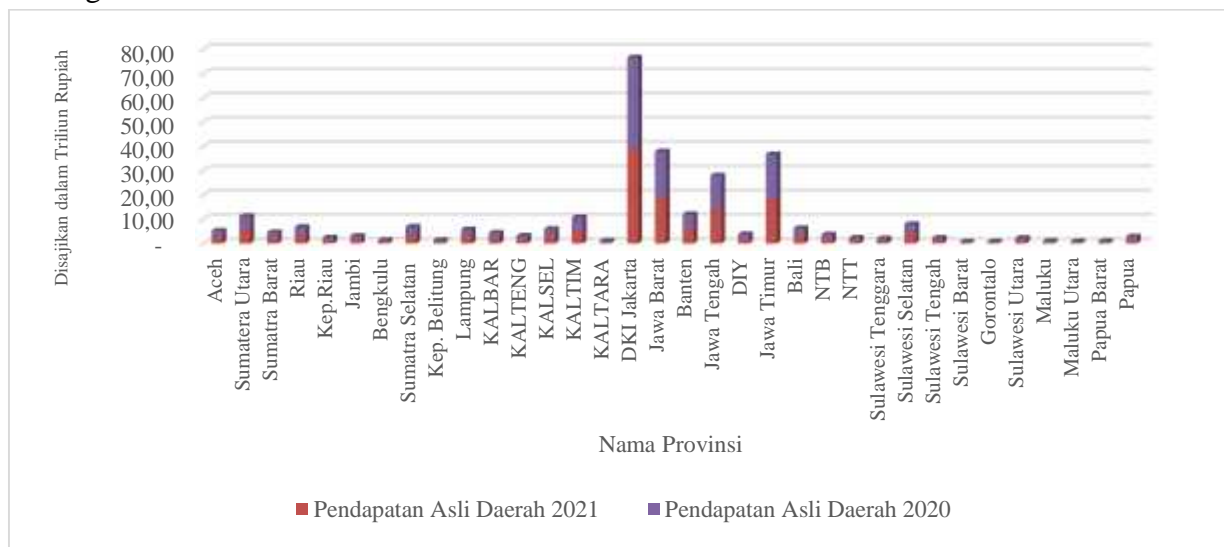
Indeks kapasitas anggaran dari indikator kemandirian keuangan menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Banten dengan nilai indeks tertinggi pada tahun 2020 dan 2021 (tabel 1). Nilai indeks kemandirian keuangan tertinggi berada pada 0,63 dan 0,60 (tabel 1). Sedangkan, pemerintah provinsi Papua Barat memperoleh indeks kemandirian keuangan terendah dengan nilai 0,06 dan 0,07 (tabel 1).

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah menjadi anggaran utama didalam penilaian

kemandirian keuangan daerah. Realisasi PAD pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2020 sebesar 6 Triliun Rupiah dan 5,9 Triliun Rupiah pada 2021 (gambar 4). Sedangkan, realisasi DAU sebesar 1 Triliun Rupiah dan DAK 2,6 Triliun Rupiah pada tahun 2021 (gambar 3). Nilai realisasi pendapatan daerah yang cukup besar dari PAD menyebabkan tingkat kemandirian keuangan pemerintah Provinsi Banten pada masa pandemi covid 19 sangat baik. Pemerintah Provinsi Banten dapat mengoptimalkan pengelolaan PAD untuk memenuhi belanja daerah yang cukup besar akibat pandemi covid 19.

Pemerintah Provinsi Papua Barat merealisasikan PAD sebesar 500 Miliyar Rupiah pada 2021 dan 485 Miliyar Rupiah pada 2020 (gambar 4). Sedangkan, realisasi DAU dan DAK pada tahun 2020 sebesar 1,3 Triliun Rupiah dan 656 Milyar Rupiah (gambar 3). Proporsi pendapatan transfer pemerintah pusat yang relatif besar dibandingkan PAD menjadi salah satu faktor rendahnya kemandirian keuangan. Kondisi pandemi covid 19 yang meningkatkan jumlah realisasi belanja semakin mendorong rendahnya kemandirian keuangan suatu daerah.

Realisasi PAD pemerintah provinsi di Indonesia pada masa pandemi covid 19 relatif stabil mengalami peningkatan. Bahkan ada beberapa pemerintah provinsi yang mampu meningkatkan jumlah PAD dimasa pandemi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merealisasikan PAD pada tahun 2020 sebesar 37 Triliun Rupiah dan 39 Triliun Rupiah pada tahun 2021 (gambar 4). DKI Jakarta merupakan provinsi dengan realisasi PAD tertinggi di Indonesia. Pada wilayah sumatera, Provinsi Sumatera Utara mampu merealisasikan PAD sebesar 5,5 Triliun Rupiah pada 2020 dan 5,8 Triliun pada 2021 (gambar 4). Pada wilayah Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur merealisasikan PAD sebesar 5,2 Triliun Rupiah dan 5,5 Trilyun Rupiah pada pada pandemi covid 19 (gambar 4). Pada wilayah sulawesi, Provinsi Sulawesi Selatan merealisasikan PAD sebesar 3,8 Triliun Rupiah dan 4 Trilyun Rupiah (gambar 4). Kondisi ini menunjukkan bahwa pandemi covid 19 tidak banyak mempengaruhi realisasi PAD di Indonesia. Walaupun terjadi pembatasan aktivitas masyarakat sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.



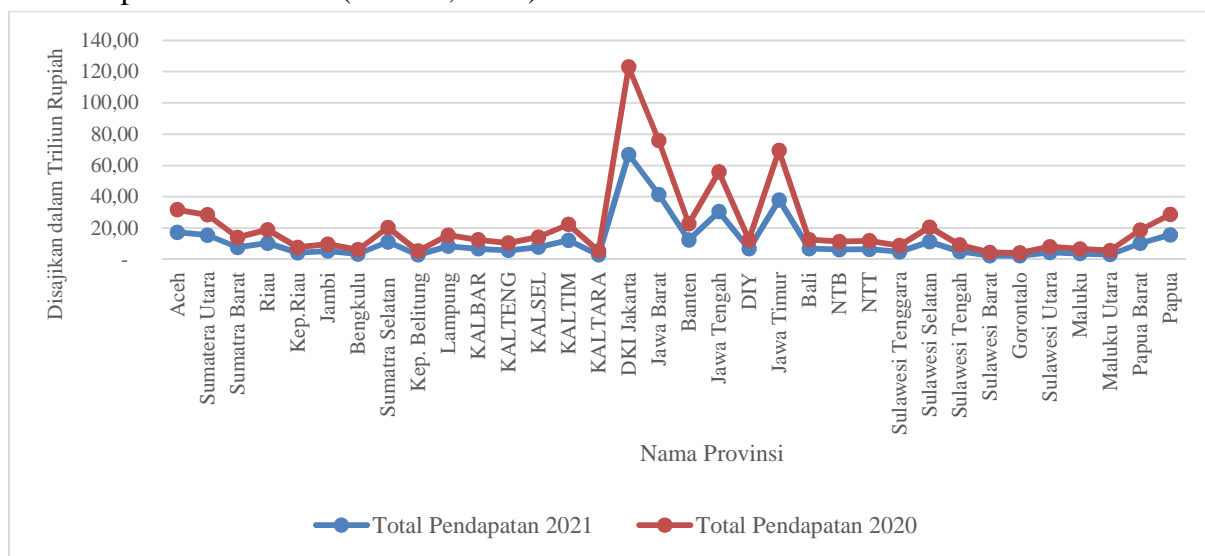
Sumber: Data Olahan (Direktorat Jendral Perbendaharaan Keuangan, 2022)

Gambar 4. Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 dan 2021

Solvabilitas Layanan

Indeks kapasitas anggaran atas indikator solvabilitas layanan menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat memperoleh nilai indeks tertinggi dengan 0,75 pada 2022 dan 0,77 pada 2021 (tabel 1). Sedangkan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperoleh nilai terendah 0,02 pada tahun 2020 dan 2021 (tabel 1). Solvabilitas layanan merepresentasikan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat dengan kapasitas anggaran yang dimiliki. Pemerintah provinsi dengan indeks tertinggi memiliki kapasitas pendapatan daerah yang besar untuk menyelenggarakan pelayanan publik, dibandingkan jumlah penduduk. Pemerintah Provinsi Papua Barat memiliki total pendapatan sebesar 8,5 Triliun Rupiah pada 2020 dan 10,2 Triliun Rupiah pada 2021 (gambar 5). Sedangkan, realisasi total belanja pada tahun 2020 sebesar 9,7 Triliun Rupiah dan 11,2 Triliun Rupiah (gambar 6). Jumlah penduduk di Papua Barat sebesar 941.598 pada tahun 2021 (BPS RI, 2022).

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merealisasikan total pendapatan daerah sebesar 3,5 Triliun Rupiah pada 2020 dan 4,2 Triliun Rupiah pada 2021 (gambar 5). Total realisasi belanja pada 2020 sebesar 3,8 Triliun Rupiah dan 4,4 Triliun Rupiah pada 2021 (gambar 6). Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau 6.861.720 jiwa pada 2021 (BPS RI, 2022). Kapasitas anggaran pemerintah provinsi kepulauan riau yang relatif kecil dengan perbandingan jumlah penduduk yang besar menyebabkan indeks solvabilitas layanan rendah. Kapasitas anggaran daerah sangat mempengaruhi tingkat penyelenggaraan layanan publik. Pandemi covid 19 yang terjadi begitu cepat dan merubah tata cara kehidupan masyarakat membawa dampak yang cukup besar terhadap perekonomian negara. Pandemi covid 19 mempengaruhi rencana keuangan pemerintah dan kekuatan keuangan pemerintah. Pada sebagian pemerintah jumlah kapasitas dan kemampuan realisasi anggaran sangat terbatas.

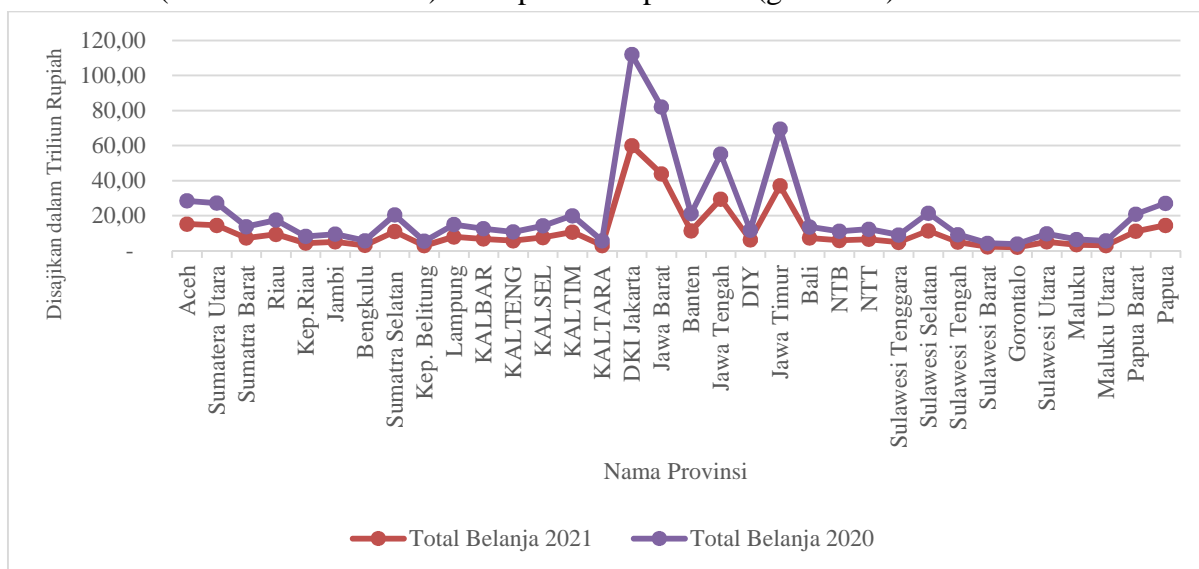


Sumber: Data Olahan (Direktorat Jendral Perbendaharaan Keuangan, 2022)

Gambar 5. Perbandingan Realisasi Total Pendapatan Tahun 2021 dan 2020

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dimasa covid 19 tidak terlalu signifikan perubahannya. Provinsi DKI Jakarta tetap menjadi daerah dengan realisasi pendapatan dan belanja tertinggi di Indonesia (Gambar 5 dan 6). Proporsi

realisasi pendapatan tahun 2020 pada saat awal pandemi terjadi relatif cukup tinggi, namun pada 2021 dampak pandemi mulai terlihat dengan terjadinya penurunan realisasi pendapatan diseluruh pemerintah provinsi (gambar 5).



Sumber: Data olahan (Direktorat Jendral Perbendaharaan Keuangan, 2022)

Gambar 6 Proporsi Realisasi Total Belanja Tahun 2020 dan 2021

Realisasi belanja pemerintah provinsi di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2021. Dampak pandemi covid 19 mulai terlihat akibat penurunan realisasi belanja daerah dibandingkan tahun 2020 (gambar 6). Penurunan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2021 mengakibatkan terjadinya penurunan indeks kapasitas anggaran.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 1 indeks kapasitas anggaran daerah selama masa pandemi dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. Pertama,

pemerintah daerah mengalami penurunan nilai indeks, kedua pemerintah daerah mengalami peningkatan indeks, dan ketiga memperoleh nilai indeks yang sama atau stabil dimasa pandemi covid 19. Sebagian besar pemerintah provinsi di Indonesia mengalami peningkatan indeks solvabilitas anggaran pada tahun 2021. Namun, indeks kemandirian keuangan mengalami penurunan. Sedangkan, indeks solvabilitas layanan sebagian besar mengalami stabilitas pada tahun 2021.

Tabel 1. Indeks Kapasitas Anggaran Daerah di Indonesia

Nama Provinsi	2021			2020		
	Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Solvabilitas Layanan
Aceh	0,61	0,21	0,18	0,60	0,24	0,18
Sumatera Utara	0,43	0,50	0,05	0,34	0,61	0,06
Sumatera Barat	0,29	0,54	0,10	0,36	0,46	0,08
Riau	0,45	0,49	0,41	0,45	0,50	0,39
Kepulauan Riau	0,22	0,45	0,02	0,21	0,45	0,02
Jambi	0,30	0,49	0,10	0,27	0,52	0,10
Bengkulu	0,27	0,50	0,14	0,24	0,54	0,14
Sumatera Selatan	0,37	0,44	0,08	0,34	0,49	0,08
Kepulauan Bangka Belitung	0,20	0,42	0,16	0,16	0,47	0,17
Lampung	0,34	0,57	0,59	0,32	0,60	0,59
Kalimantan Barat	0,28	0,55	0,10	0,26	0,57	0,10
Kalimantan Tengah	0,23	0,44	0,19	0,21	0,47	0,19
Kalimantan Selatan	0,37	0,46	0,12	0,37	0,47	0,12
Kalimantan Timur	0,65	0,48	0,22	0,65	0,49	0,21
Kalimantan Utara	0,21	0,37	0,44	0,18	0,39	0,44
DKI Jakarta	0,71	0,50	0,38	0,73	0,51	0,38
Jawa Barat	0,51	0,56	0,03	0,50	0,57	0,03
Banten	0,53	0,60	0,04	0,52	0,63	0,04
Jawa Tengah	0,59	0,59	0,03	0,57	0,62	0,03
Daerah Istimewa Yogyakarta	0,39	0,41	0,11	0,37	0,44	0,11
Jawa Timur	0,49	0,58	0,04	0,49	0,60	0,04
Bali	0,32	0,55	0,11	0,32	0,55	0,11
Nusa Tenggara Barat	0,31	0,53	0,08	0,29	0,56	0,08
Nusa Tenggara Timur	0,17	0,51	0,10	0,15	0,52	0,09
Sulawesi Tenggara	0,11	0,57	0,20	0,15	0,50	0,16
Sulawesi Selatan	0,25	0,53	0,08	0,22	0,56	0,09
Sulawesi Tengah	0,24	0,48	0,13	0,21	0,52	0,13
Sulawesi Barat	0,24	0,47	0,16	0,19	0,54	0,16
Gorontalo	0,28	0,49	0,16	0,25	0,53	0,16
Sulawesi Utara	0,06	0,45	0,17	0,03	0,46	0,17
Maluku	0,19	0,53	0,21	0,18	0,53	0,20
Maluku Utara	0,18	0,47	0,26	0,16	0,48	0,25
Papua Barat	0,50	0,07	0,77	0,50	0,06	0,75
Papua	0,64	0,17	0,27	0,65	0,16	0,26

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Ket:  Indeks terendah
 Indeks tertinggi

Indeks Kapasitas Anggaran Klaster Kepulauan

Penilaian indeks kapasitas anggaran berdasarkan klaster kepulauan di Indonesia, meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Penilaian ini akan menunjukkan tingkatan ketahanan kapasitas anggaran pemerintah provinsi di masing-masing kepulauan. Indeks kapasitas anggaran akan disajikan untuk tahun 2020 dan 2021.

Indeks kapasitas anggaran pemerintah provinsi pada kepulauan Sumatera pada tabel 2 memiliki nilai yang stabil. Indeks solvabilitas anggaran terbaik diperoleh Provinsi Aceh, sedangkan terendah kepulauan Bangka Belitung. Indeks kemandirian keuangan tertinggi Lampung pada tahun 2021 sedangkan Sumatera Utara tahun 2020. Kemandirian keuangan terendah diperoleh Aceh. Indeks solvabilitas layanan terbaik Lampung dan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2. Indeks Kapasitas Anggaran Daerah-Sumatera

Indikator		2021	2020
Solvabilitas Anggaran	Indeks Tertinggi	Aceh (0,61)	Aceh (0,60)
	Indeks Terendah	Kepulauan Belitung (0,20)	Kepulauan Belitung (0,16)
Kemandirian Keuangan	Indeks Tertinggi	Lampung (0,57)	Sumatera Utara (0,61)
	Indeks Terendah	Aceh (0,21)	Aceh (0,24)
Solvabilitas Layanan	Indeks Tertinggi	Lampung (0,59)	Lampung (0,59)
	Indeks Terendah	Kepulauan Riau (0,02)	Kepulauan Riau (0,02)

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Indeks kapasitas anggaran pemerintah provinsi di pulau Jawa pada tabel 3 memiliki nilai yang stabil. Indeks solvabilitas anggaran tertinggi provinsi DKI Jakarta dan terendah Yogyakarta. Indeks

kemandirian keuangan tertinggi Banten dan terendah Yogyakarta. Indeks solvabilitas layanan tertinggi DKI Jakarta dan terendah Jawa Barat.

Tabel 3. Indeks Kapasitas Anggaran-Jawa

Indikator		2021	2020
Solvabilitas Anggaran	Indeks Tertinggi	DKI Jakarta (0,71)	DKI Jakarta (0,73)
	Indeks Terendah	DIY (0,39)	DIY (0,37)
Kemandirian Keuangan	Indeks Tertinggi	Banten (0,60)	Banten (0,63)
	Indeks Terendah	DIY (0,41)	DIY (0,44)
Solvabilitas Layanan	Indeks Tertinggi	DKI Jakarta (0,38)	DKI Jakarta (0,38)
	Indeks Terendah	Jawa Barat (0,03)	Jawa Barat (0,03)

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Indeks kapasitas anggaran pemerintah provinsi di Kalimantan pada tabel 4 memiliki nilai yang stabil. Pemerintah provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat memperoleh nilai indeks tertinggi. Indeks solvabilitas anggaran tertinggi diperoleh

Kalimantan Timur dan terendah Kalimantan Utara. Indeks kemandirian keuangan tertinggi diperoleh Kalimantan Barat dan terendah Kalimantan Utara. Sedangkan indeks solvabilitas layanan tertinggi Kalimantan Utara dan terendah Kalimantan Barat.

Tabel 4. Indeks Kapasitas Anggaran Daerah-Kalimantan

Indikator		2021	2020
Solvabilitas Anggaran	Indeks Tertinggi	Kalimantan Timur (0,65)	Kalimantan Timur (0,65)
	Indeks Terendah	Kalimantan Utara (0,21)	Kalimantan Utara (0,18)
Kemandirian Keuangan	Indeks Tertinggi	Kalimantan Barat (0,55)	Kalimantan Barat (0,57)
	Indeks Terendah	Kalimantan Utara (0,37)	Kalimantan Utara (0,39)
Solvabilitas Layanan	Indeks Tertinggi	Kalimantan Utara (0,44)	Kalimantan Utara (0,44)
	Indeks Terendah	Kalimantan Barat (0,10)	Kalimantan Barat (0,10)

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Hasil penilaian indeks kapasitas anggaran pada pulau Sulawesi menempatkan provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tenggara sebagai dua pemerintah

provinsi dengan indeks tertinggi dimasa pandemi covid 19 (tabel 5). Pemerintah provinsi Gorontalo mendapatkan nilai tertinggi pada indeks solvabilitas anggaran.

Sedangkan, provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh nilai indeks tertinggi pada kemandirian keuangan dan solvabilitas layanan. Indeks kapasitas anggaran terendah diperoleh Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Utara

memperoleh indeks solvabilitas anggaran dan kemandirian keuangan terendah. Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh indeks solvabilitas layanan terendah dimasa pandemi covid 19.

Tabel 5. Indeks Kapasitas Anggaran Daerah-Sulawesi

Indikator		2021	2020
Solvabilitas Anggaran	Indeks Tertinggi	Gorontalo (0,28)	Gorontalo (0,25)
	Indeks Terendah	Sulawesi Utara (0,06)	Sulawesi Utara (0,03)
Kemandirian Keuangan	Indeks Tertinggi	Sulawesi Tenggara (0,57)	Sulawesi Selatan (0,56)
	Indeks Terendah	Sulawesi Utara (0,45)	Sulawesi Utara (0,46)
Solvabilitas Layanan	Indeks Tertinggi	Sulawesi Tenggara (0,20)	Sulawesi Utara (0,17)
	Indeks Terendah	Sulawesi Selatan (0,08)	Sulawesi Selatan (0,09)

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Indeks kapasitas anggaran tertinggi yaitu Provinsi Bali dan NTB pada tabel 6 klaster wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Provinsi Bali memperoleh indeks tertinggi pada solvabilitas anggaran, kemandirian

keuangan, dan solvabilitas layanan pada 2021. Sedangkan, Provinsi NTT memperoleh indeks terendah pada solvabilitas anggaran dan kemandirian keuangan.

Tabel 6. Indeks Kapasitas Anggaran Daerah-Bali dan Nusa Tenggara

Indikator		2021	2020
Solvabilitas Anggaran	Indeks Tertinggi	Bali (0,32)	Bali (0,32)
	Indeks Terendah	NTT (0,17)	NTT (0,15)
Kemandirian Keuangan	Indeks Tertinggi	Bali (0,55)	NTB (0,56)
	Indeks Terendah	NTT (0,51)	NTT (0,52)
Solvabilitas Layanan	Indeks Tertinggi	Bali (0,11)	Bali (0,11)
	Indeks Terendah	NTB (0,08)	NTB (0,08)

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Penilaian indeks kapasitas anggaran pada tabel 7 menempakan provinsi Papua, Maluku, dan Papua Barat sebagai pemerintah daerah dengan indeks tertinggi untuk klaster Maluku dan Papua. Provinsi Papua memperoleh indeks solvabilitas

anggaran tertinggi. Provinsi Maluku memperoleh indeks kemandirian keuangan tertinggi. Indeks solvabilitas layanan tertinggi adalah provinsi Papua Barat. Ketiga pemerintah provinsi ini mampu mempertahankan kapasitas anggarannya selama masa pandemi covid 19.

Tabel 7. Indeks Kapasitas Anggaran Daerah-Maluku dan Papua

Indikator		2021	2020
Solvabilitas Anggaran	Indeks Tertinggi	Papua (0,64)	Papua (0,65)
	Indeks Terendah	Maluku Utara (0,18)	Maluku Utara (0,16)
Kemandirian Keuangan	Indeks Tertinggi	Maluku (0,53)	Maluku (0,53)
	Indeks Terendah	Papua Barat (0,07)	Papua Barat (0,06)
Solvabilitas Layanan	Indeks Tertinggi	Papua Barat (0,77)	Papua Barat (0,75)
	Indeks Terendah	Maluku (0,22)	Maluku (0,20)

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)

Ketangguhan Kapasitas Anggaran Pemerintah Provinsi di Masa Pandemi Covid 19

APBD merupakan instrument fiskal yang berperan penting didalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah dimasa pandemi covid 19. Kapasitas APBD pemerintah provinsi di Indonesia cukup tangguh jika dihadapkan dengan kondisi tidak terduga seperti pandemi covid 19. Hal ini ditunjukkan dengan indeks kapasitas anggaran pemerintah provinsi di Indonesia berada pada nilai yang baik selama masa pandemi covid 19. Sebagai kecil pemerintah daerah dapat meningkatkan realisasi pendapatan dan belanja ditengah masa pandemi (Desdiani et al., 2022). Namun, pada masa pandemi sebagian besar pemerintah daerah yang mengalami penurunan pendapatan dan belanja (Desdiani et al., 2022). Hal ini terlihat dari nilai indeks kapasitas anggaran yang mengalami penurunan.

Penurunan indeks kapasitas anggaran terjadi pada 2021 namun dengan nilai yang relatif kecil. Dampak pandemi mulai terlihat pada realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada tahun 2021. Salah satu faktor menurunnya realisasi anggaran akibat penerapan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) oleh pemerintah. Pada daerah dengan tingkat kasus covid 19 tertinggi akan diberlakukan PSBB level 1. Pandemi covid 19 mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan tatanan hidup baru guna mengurangi penyebaran kasus positif (sari, 2021). Kondisi ini sangat berdampak kepada aktivitas masyarakat sehingga berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi daerah (Temenggung et al., 2020). Selain itu, disaat yang bersamaan pemerintah provinsi memiliki tugas untuk menanggulangi penyebaran kasus covid 19 dengan upaya

vaksinasi massal dan penambahan fasilitas kesehatan khusus covid 19. Covid 19 mungkin tidak akan cepat berakhir, jika aksi penanganan lambat dilakukan (Susantono, et al., 2020). Pada masa pandemi terjadi peningkatan jumlah realisasi belanja daerah pada bidang kesehatan. Banyak negara mengalami pengeluaran anggaran yang besar untuk menangani pandemi, perlindungan kesehatan masyarakat, dan dampak ekonomi lainnya (United Nation, 2020). Anggaran pemerintah harus mengutamakan realisasi untuk meningkatkan perlindungan bidang kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi agar mengurangi ketidaksamaan sosial (Haruhiko, 2020).

Kondisi keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh jumlah populasi penduduk, biaya produksi dan jasa, jumlah pendapatan (Ritonga, et al., 2019). Kapasitas anggaran pemerintah daerah akan menentukan keberhasilan dalam mengatasi covid 19 (Susantono, et al., 2020). Kapasitas anggaran daerah berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam menanggulangi pandemi (I. K. Indriani, 2022). Pemerintah daerah dapat menilai kapasitas anggaran daerah dengan indikator solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan. Indeks solvailitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan mempengaruhi kemampuan daerah dalam menghadapi kondisi pandemi (I. K. et al Indriani, 2022). Oleh karena itu, pengelolaan APBD yang optimal akan berdampak kepada penanganan dan rekonstruksi ekonomi daerah dimasa datang pasca pandemi. Kapasitas anggaran pemerintah daerah mengalami depresiasi akibat peningkatan belanja dan penurunan pendapatan sehingga berpotensi mengalami krisis keuangan (OECD, 2020).

Pada masa pandemi covid 19 pemerintah daerah sangat tergantung pada

transfer pemerintah pusat. Hal ini terlihat pada realisasi DAU, DAK, dan DBH mendominasi pendapatan daerah dimasa pandemi. Pemerintah daerah masih mengandalkan DAK, DAU, dan DBH dalam struktur APBD (Hidayat, et al., 2007). Pos-Pos pendapatan transfer utama yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah meliputi dana perimbangan, dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, transfer pemerintah pusat lainnya, dana penyesuaian, dan dana transfer pemerintah provinsi lain (Sibua & Pribadi, 2019).

Realisasi belanja pemerintah daerah meningkat akibat covid 19. Realisasi belanja operasional dan belanja modal menjadi proporsi terbesar pada kapasitas anggaran daerah (I. K. Indriani, 2022). Pemerintah daerah memiliki proporsi besar pada realisasi belanja operasional (I. K. et al Indriani, 2022). Pada masa pandemi diperlukan kemampuan daerah dalam melakukan efisiensi belanja rutin untuk dialokasikan penanggulangan pandemi (I. K. Indriani et al., 2021). Antisipasi perlambatan ekonomi daerah akibat pandemi perlu dilakukan. Pemerintah akan meningkatkan anggaran yang dialokasikan untuk aktivitas pemerintah, perlindungan sosial, dan kesehatan masyarakat (Lilly, et al., 2020). Pemerintah daerah merealokasi anggaran dari pos-pos belanja tidak prioritas kepada belanja kesehatan. Hal ini ditujukan untuk menurunkan tingkan defisit anggaran daerah (Suparman, 2021). Penambahan jumlah kasus covid 19 berbanding lurus dengan penambahan anggaran pengeluaran pemerintah daerah sebanyak 5%-10% (Norman, 2021). Pandemi covid 19 menyerap anggaran yang cukup besar untuk penaggulungannya (United Nation, 2020).

Pandemi membawa dampak luar bisa bagi keuangan (Klimanov et al., 2021). Pandemi covid 19 mengakibatkan penurunan pendapatan pajak karena menurunnya aktivitas ekonomi (Nugroho & Muhyiddin, 2021). Pandemi covid 19 berdampak kepada penurunan target realisasi penerimaan pajak (Hapsari, Dian Indiana, Ratnawati, 2021). Anggaran pemerintah saat ini menjadi penopang utama bagi pertumbuhan ekonomi negara. Tanggapan pemerintah daerah sangat penting untuk tahapan pemulihan ekonomi dari pandemi. (Ahrens & Ferry, 2021). Kapasitas anggaran daerah pada kebanyakan negara di dunia memiliki masalah jika dihadapkan pada kejadian tidak terduga seperti pandemi, perubahan iklim, dan krisis ekonomi (Heald & Hodges, 2020).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan penelitian bahwa kapasitas anggaran pemerintah daerah di Indonesia memiliki ketahanan yang baik pada masa pandemi covid 19. Indeks kapasitas anggaran tertinggi secara nasional adalah pemerintah provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Papua Barat. Indeks kapasitas anggaran terendah secara nasional adalah pemerintah provinsi Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Papua Barat.

Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu penambahan jumlah tahun pengamatan. Hal ini disebabkan oleh penilaian ketahanan kapasitas anggaran daerah hanya dilakukan pada kurun waktu 2020 dan 2021. Kondisi ini tepat terjadinya pandemi covid 19. Penilaian ini memerlukan jangka waktu yang lebih panjang untuk mengetahui kemampuan kapasitas anggaran daerah dalam menghadapi kejadian tidak terduga. Selain itu, kondisi krisis ekonomi pasca pandemi

covid 19 dapat menjadi fenomena masa depan yang dapat diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahrens, T., & Ferry, L. (2021). Debate: What support should local government expect from accounting during a sudden crisis such as Covid-19? *Public Money and Management*, 41(1), 12–14. <https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1825163>
- BPS RI. (2022, Mei 22). BPS. Retrieved from BPS: <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>
- Cho, C. H., & Kurpierz, J. (2020). Stretching the public purse: budgetary responses to COVID-19 in Canada. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(5), 771–783. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-05-2020-0070>
- Clouston, S. A. P., Natale, G., & Link, B. G. (2021). Socioeconomic inequalities in the spread of coronavirus-19 in the United States: A examination of the emergence of social inequalities. *Social Science and Medicine*, 268(November 2020), 113554. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113554>
- De Jong, M., & Ho, A. T. (2021). Emerging fiscal health and governance concerns resulting from COVID-19 challenges. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 29(6), 1–11. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0137>
- Desdiani, N. A., Sabrina, S., Husna, M., Budiman, A. C., Afifi, F. A. R., & Halimatussadiyah, A. (2022). Local Budget Resilience in Times of COVID-19 Crisis: Evidence from Indonesia. *Economies*, 10(5). <https://doi.org/10.3390/economies10050108>
- Direktorat Jendral Perbendaharaan Keuangan. (2022, Maret 1). *DJPK Kementerian Keuangan RI*. Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Hapsari, Dian Indiana, Ratnawati, J. (2021). Pengaruh Dana Bagi Hasil (Dbh) Pajak Dan Bukan Pajak Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kota Bogor Tahun 2010 – 2017. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 36–47. <https://doi.org/10.37403/financial.v6i1.131>
- Hasibuan, G. L., Dermawan, D., Ginting, H. S., & Muda, I. (2020). Allocation of COVID-19 Epidemic Funding Budgets In Indonesia. *International Journal of Research and Review*, 7(5), 75–80.
- Indriani, I. K. et al. (2022). The Effect Financial Condition on Covid 19 Case (Empirical Study on Local Government in West Kalimantan). *Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1394–1410. <https://doi.org/10.1002/9781119558361.ch20>
- Indriani, I. K. (2022). *The Effect Of Local Government Budget Capacity On Covid-19 Cases Handling: Study In District Government Of Kalimantan Island (Projection In Facing Pandemic) Jurusan Akuntansi , Politeknik Negeri Pontianak , Jalan Ahmad Yani Pontianak , Indonesia THE EF*. 48(1), 37–54. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2292>
- Indriani, I. K., Nugroho, Y. A., & ... (2021). Penilaian Kondisi Keuangan Provinsi Kalimantan Barat-Proyeksi dalam Menghadapi Pandemi Covid 19. *JEBA (Journal of ...)*, 6(2), 30–52. <https://www.academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/jeba/article/view/2171>
- Klimanov, V., Kazakova, S., Mikhaylova, A., & Safina, A. (2021). Fiscal resilience of Russia’s regions in the face

- of COVID-19. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 33(1), 87–94. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0123>
- Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2021). *Data Sebaran*. Jakarta: Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Retrieved Desember 31, 2021, from <https://covid19.go.id/>
- Muhyiddin, M., & Nugroho, H. (2021). A Year of Covid-19: A Long Road to Recovery and Acceleration of Indonesia's Development. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.36574/jpp.v5i1.181>
- OECD. (2020a). *Initial Budget and Public Management Responses to the Coronavirus(COVID-19) Pandemic in OECD Countries*. April, 1–206.
- OECD. (2020b). The impact of the COVID-19 crisis on regional and local governments: Main findings from the joint CoR-OECD survey. *OECD Regional Development Papers*, 5.
- Payne, J. L., Morgan, A., & Piquero, A. R. (2021). Exploring regional variability in the short-term impact of COVID-19 on property crime in Queensland, Australia. *Crime Science*, 10(1), 1–20. <https://doi.org/10.1186/s40163-020-00136-3>
- Ritonga, I. T. (2015). Developing a Measure of Local Government's Financial Condition. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 29(2), 142–164. <https://doi.org/10.22146/jieb.6206>
- Sandjaja, F. R., Nafisa, F., & Manurung, I. N. (2020). The Impact of Fiscal Decentralization on Welfare in Selected Provinces in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 21–31. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.21-31>
- Sari, Imelda. (2021). *Financial: Jurnal Akuntansi Memahami Peranan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Understanding The Role Of The Indonesian Stock Exchange Triwulan Ii-2020 terhadap Triwulan II-2019 Triwulan III-2019 ekonomi Indonesia kembali m. 7.*
- Subekan, A., & Iskandar, A. (2020). Pandemi Covid-19 dan Kebijakan Anggaran Defisit: Analisis Konjungtur Ekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 20(2), 142–152.
- Suparman, N. (2021). Strategic priorities and accountability for allocating the state budget amid Covid-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 9(1), 61–72. <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i1.11640>
- Susantono, B., Sawada, Y., & Park, C.-Y. (2020). *Navigating COVID-19 in Asia and the Pacific* (Issue September).
- Suyitno, A. (2020). Dampak Pandemi Terhadap Penyerapan Anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Public Policy*, 6(2), 67. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.2446>
- Temenggung, Y. A., Moenek, R., Suwanda, D., & Mulyadi, M. (2020). The Fiscal Capacity of the New Autonomous Region (DOB) in Increasing Economic Growth and Eradication of the Poor. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 75–87. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.75-87>